

Judul : Bantu pelayanan kesehatan, legislator sarankan gunakan teknologi AI
Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Bantu Pelayanan Kesehatan

Legislator Sarankan Gunakan Teknologi AI

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) untuk membantu pelayanan kesehatan di daerah kekurangan dokter. Teknologi ini bisa jadi solusi sementara guna menjembatani keterbatasan tenaga medis yang masih terjadi.

Nihayatul mengaku miris melihat banyak daerah yang tidak memiliki dokter, sementara proses pendidikan tenaga medis membutuhkan waktu panjang sebelum siap melayani masyarakat. Agar bisa bertugas penuh, lulusan kedokteran wajib melewati berbagai tahapan lanjutan, termasuk koas dan program pendidikan lainnya.

Di saat yang sama, kata dia, AI telah dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan berbagai sektor. "Masyarakat tidak mungkin menunggu terlalu lama karena kebutuhan layanan kesehatan harus terpenuhi tiap saat," ujar Nihayatul dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Nihayatul menyebut, solusi jangka panjang melalui pembiayaan pendidikan bagi putra daerah tetap perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan dokter. Namun, upaya itu tetap membutuhkan waktu cukup panjang. Lagipula, kebijakan itu belum tentu diikuti kesediaan tenaga medis untuk ditempatkan di wilayah terpencil.

Dia mengatakan, perkembangan teknologi AI saat ini telah membantu banyak sektor dalam menjalankan berbagai fungsi pelayanan. Karena itu, pemanfaatan teknologi serupa di bidang kesehatan layak dipertimbangkan. "Meski penggunaannya mungkin hanya dapat membantu penanganan penyakit tertentu," kata politikus PKB itu.

Sebagai bukti kemajuan layanan digital, Nihayatul juga menyinggung keberhasilan teknologi operasi jarak jauh yang pernah dilakukan Kemenkes. Konsep serupa juga bisa jadi dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pemeriksaan kesehatan jarak jauh di daerah yang belum memiliki dokter.

Nihayatul menyadari, penggunaan AI dalam pelayanan



Nihayatul Wafiroh

kesehatan tidak akan mampu menggantikan seluruh peran dokter. Namun setidaknya teknologi yang tersedia saat ini bisa membantu sebagian kebutuhan layanan bagi masyarakat. "Terutama untuk penanganan kasus atau penyakit tertentu," ucapnya.

Menanggapi usulan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menilai, kehadiran dokter secara langsung masih dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Untuk kondisi saat ini, pendekatan yang bisa dikembangkan adalah *telemedicine*. Di

waktu yang sama, pihaknya tetap mencari solusi atas kekurangan dokter di daerah terpencil.

Budi mengatakan, teknologi seperti *telemedicine*, AI, dan berbagai inovasi digital bisa berfungsi sebagai pelengkap layanan kesehatan. Namun, pemanfaatan teknologi tidak boleh mengalihkan perhatian dari upaya memperbanyak jumlah dokter serta memperbaiki distribusi tenaga medis ke berbagai daerah.

Dia menegaskan, kehadiran dokter secara langsung tetap diperlukan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. "Karena tenaga medis harus melihat kondisi pasien secara nyata, melakukan pemeriksaan, serta berinteraksi langsung agar proses diagnosis dan penanganan bisa berlangsung dengan lebih tepat," jelasnya.

Budi mengakui Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan dokter, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi itu ikut menyebabkan tingginya beban kerja tenaga kesehatan di berbagai wilayah, karena kebutuhan pelayanan

masyarakat belum sebanding dengan jumlah tenaga tersedia.

Kekurangan dokter, kata dia, membuat sejumlah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) harus ikut serta menjalankan tugas pelayanan di fasilitas kesehatan. "Akibatnya, banyak dokter harus bekerja di luar jadwal pendidikan maupun jam kerja yang semestinya mereka jalani," ungkapnya.

Budi mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang masih mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis. Padahal wilayah itu memiliki sekitar 17 puskesmas untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, tapi tidak satu pun memiliki dokter spesialis yang bertugas secara tetap.

Persoalan kesehatan, sambung Budi, bukan hanya terkait jumlah dokter secara nasional, melainkan juga ketimpangan distribusi tenaga medis. "Karena sejumlah kota besar mengalami kelebihan dokter, sementara banyak kabupaten dan wilayah terpencil masih kesulitan mendapatkan tenaga kesehatan," pungkasnya. ■ PYB